

## ANALISIS CAPITAL EXPENDITURE

**Beta Asteria**

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

[beta\\_asteria@stieww.ac.id](mailto:beta_asteria@stieww.ac.id)

### *Abstract*

*This research uses panel data which is a combination of time series data and cross section data. Time series data for 3 years, from 2016-2018. As well as cross section data of 27 districts / cities. Incomplete data, no data on Revenue Sharing Funds are Indramayu District and Bekasi City. So that the cross section data used in the study were 25 districts/ cities. The number of observations (n) is 75. Source of data comes from the Directorate General of Fiscal Balance. The data used is the data on the realization of the West Java Regional Budget. The results of the research based on the t test prove that only the Regional Original Income variable partially has a significant effect on capital expenditures in regencies/ cities in West Java. Meanwhile, the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and the Profit Sharing Fund partially have no effect on Regional Original Income. The F test proves that the Regional Original Income, the General Allocation Fund the Special Allocation Fund and the Revenue Sharing Fund simultaneously have an effect on Regency/ City Capital Expenditures in West Java. The result of the coefficient of determination ( $Ajd R^2$ ) is 0.772. This means that Regional Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Share Fund are able to explain the variability of Capital Expenditure of 77.20 percent, the remaining 22.8 percent is explained by other variables outside the model. It can be concluded that Regency / City Capital Expenditures in West Java rely on Regional Original Income.*

**Keyword:** *General Allocation Fund, Special Allocation Fund and the Profit Sharing Fund, Regional Original Income and Capital Expenditure*

### **Abstraksi.**

Penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Data time series selama 3 tahun, dari tahun 2016-2018. Serta data cross section sebanyak 27 Kabupaten/Kota. Data yang tidak lengkap, tidak ada data Dana Bagi Hasil adalah Kab Indramayu dan Kota Bekasi. Sehingga data cross section yang digunakan dalam penelitian sebanyak 25 Kabupaten/Kota. Jumlah observasi (n) sebanyak 75. Sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan adalah data realisasi APBD Jawa Barat. Hasil penelitian berdasarkan Uji t membuktikan hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji F membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Hasil Uji Koefisien determinasi ( $Ajd R^2$ ) sebesar 0,772. Artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil mampu menjelaskan variabilitas Capital Expenditure atau Belanja Modal sebesar 77,20 persen sisa 22,8 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal

## PENDAHULUAN

Indonesia mengalami peningkatan sistem tata kelola pemerintahan, dalam kurun waktu yang singkat. Pemerintah Indonesia sudah mengalami reformasi sektor publik khususnya pada bagian manajemen keuangan daerah. Reformasi manajemen keuangan daerah dimulai dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adapun salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas manajemen keuangan daerah (Mahmudi, 2010). Reformasi tersebut membawa dampak perubahan yang berarti terhadap kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia.

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otoritas pemerintah daerah dilakukan dengan cara pemerintah pusat melakukan transfer sejumlah dan perimbangan, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil yang terdiri pajak dan sumberdaya Alam. Disamping dari dana perimbangan, pemerintah daerah mempunyai sumber dana yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin tinggi PAD Pemerintah daerah maka akan semakin kecil tergantung fiskal pada pemerintah pusat. Semakin optimal pula penggunaan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan ditingkat pemerintah daerah. PAD

sebagian besar berasal dari pajak daerah. Pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan. Selain itu PAD juga berasal dari Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan daerah dan sumber-sumber PAD lainnya yang sah.

Sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tumpuan bagi Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Selain itu, dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat. Disamping dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dalam hal ini sumber keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan belanja modal pemerintah (Ifa, 2017).

Dana Bagi Hasil Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu. Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dananya dalam bentuk anggaran belanja modal (*Capital Ekpenditure*) untuk menambah aset tetap yang dimilikinya. Alokasi *Capital Ekpenditure* (belanja modal) didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, ataupun untuk fasilitas

publi (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten sebagai berikut: Penelitian (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika, Kirmizi dan Indrawati (2017) membuktikan secara empiris bahwa DBH dan DAU memberikan pengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAK, SiLPA, Rasio ketergantungan keuangan daerah dan Rasio derajat desentralisasi terbukti secara empiris tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal. Ifa (2017) menemukan bahwa secara parsial variabel PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Kuntari, Chariri dan Prabowo (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, tentang pentingnya alokasi *Capital Expenditure* bagi Pemerintah Daerah, Serta terdapat *gap research* pada hasil penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang **"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Capital Expenditure*"**. Adapun tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal atau *Capital Expenditure*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

Belanja Modal atau *Capital Expenditure*.

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modala atau *Capital Expenditure*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal atau *Capital Expenditure*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal atau *Capital Expenditure*.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Definisi Pendapatan Pemerintah Daerah**

Menurut Ifa (2017), Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan melalui sektor pendapatan, dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pemerintah daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Kelompok Pendapatan dari pemerintah daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah.

### **Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Provinsi**

Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Provinsi berasal dari pajak yang terdiri atas Pajak kendaraan bermotor, Pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air permukaan. Serta Retribusi Daerah berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, Bagian Laba BUMD dan PAD lain-lain yang sah.

Klasifikasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/ Kota berasal dari: 1) pajak yang terdiri atas: pajak daerah, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak lingkungan; 2) Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu; Bagian Laba BUMD dan PAD lain-lain yang sah. 3) Dana Perimbangan yang terdiri atas : Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Mahmudi : 2009).

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan meratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU (Dana Alokasi Umum) suatu daerah didasarkan pada alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Sartika, Kirmizi dan Indrawati : 2017).

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Besaran Dana Alokasi

Khusus (DAK) ditentukan setiap tahun dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah, serta merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN (Sartika, Kirmizi dan Indrawati : 2017).

#### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu. Tujuan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari SDA sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasar realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

#### **Belanja Modal**

Menurut Arifah, Iswanaji, dan Priyono (2014), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tersebut dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Kuntari, Chariri and Prabowo (2019) Indikator Belanja Modal adalah:

1. Pembelian tanah.
2. Pembelian peralatan dan mesin.
3. Pembelian bangunan.
4. Pengembangan jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Aset tetap lainnya.

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap *Capital Expenditure*
- H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap *Capital Expenditure*
- H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap *Capital Expenditure*
- H<sub>4</sub> : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap *Capital Expenditure*
- H<sub>5</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara simultan terhadap berpengaruh signifikan *Capital Expenditure*

### METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini data panel (*pooled data*) adalah gabungan antara *time series* dan *cross section* data (Gujarati, 2004). Data *Time series* selama 3 tahun, dari tahun 2016-2018. Serta data *cross section* sebanyak 27 Kabupaten/Kota. Data yang tidak lengkap, tidak ada data Dana Bagi Hasil adalah Kab Indramayu dan Kota Bekasi. Sehingga data *cross section* yang digunakan dalam penelitian sebanyak 25 Kabupaten/Kota. Jadi jumlah

observasi (n) sebanyak 75. Sumber data berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan adalah data realisasi APBD Jawa Barat, di dalamnya terdapat data Pajak Pendapatan Asli Daerah ( PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal.

#### Teknik Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel dengan teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh atau sensus ialah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010).

Data yang digunakan adalah seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

#### Definisi Operasional Variabel

##### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Halim, 2004), Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumus DAU sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dana Alokasi Umum} \\ &= \text{Alokasi Dasar} \\ &+ \text{Celah Fiskal} \end{aligned}$$

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), Dana Bagi Hasil (DBH) ialah dana yang berumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari SDA sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.

### **Belanja Modal**

Menurut (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tersebut dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

### **Metode Analisis Data**

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terdiri atas:

##### **1) Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

##### **2) Uji Linearitas**

Menurut (Suliyanto, 2011), pengujian linearitas dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linier atau tidak.

##### **3) Uji Heterokedastisitas**

Uji Hetrokedastisitas menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

##### **4) Uji Multikolinearitas**

Menurut (Ghozali, 2013), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

##### **5) Uji Autokorelasi**

Kondisi autokorelasi bertitik tolak dari adanya gangguan-gangguan pada hubungan antar variabel.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Capital Expenditure. Adapun model analisis regresi sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = *Capital Expenditure*

X<sub>1</sub>= Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub>= Dana Alokasi Umum

X<sub>3</sub>= Dana Alokasi Khusus

X<sub>4</sub> = Dana Bagi Hasil

b<sub>i</sub>= Parameter yang akan diukur

e = Error

### **Uji Statistik, terdiri atas:**

#### **1) Uji t-test**

Uji t-

test digunakan untuk menguji sig nifikansi pengaruh variabel Independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Kesimpulan diterima atau ditolaknya H<sub>0</sub> dan H<sub>1</sub> sebagai pembuktian adalah:

a) Jika probabilitas lebih kecil daripada maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima yang memiliki arti bahwa variabel independen

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b) Jika probabilitas lebih besar daripada maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

## 2) Uji F

Uji F-test digunakan untuk menguji *goodness of fit test* yang menunjukkan variasi pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kesimpulan diterima atau ditolaknya  $H_0$  dan  $H_1$  sebagai pembuktian adalah:

- 1) Jika probabilitas lebih kecil daripada maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika probabilitas lebih besar daripada maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat digunakan sebagai model jika estimator memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimate* (BLUE). Sebelum melakukan Analisis regresi maka perlu dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri atas:

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi diantara variabel independen. Adapun hasil olah data dengan SPSS diperoleh output sebagai berikut:

**Tabel 1. Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.003 E11	4.715 E10		2.1 27	.03 7		
PAD	.271	.044	.612	6.2 04	.00 0	.317	3.1 59
DAU	.151	.081	.223	1.8 69	.06 6	.215	4.6 43
DAK	.142	.193	.080	.73 4	.46 5	.260	3.8 49
DBH	.208	.180	.119	1.1 52	.25 3	.288	3.4 75

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Pada tabel 4.1 Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai Variance Inflation Tolerance (VIF) sebagai berikut: yaitu VIF dari variabel PAD sebesar 3,159; VIF dari DAU sebesar 4,643; VIF dari DAK sebesar 3,849 dan VIF dari Dana Bagi Hasil sebesar 3,475. Nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak model regresi terbebas dari multikolinearitas. Hal ini sesuai dengan (Ghozali, 2013) model terbebas dari multikolinearitas bila nilai VIF < 10.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji adanya gangguan-gangguan pada hubungan antar variabel. Serta bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

**Tabel.2. Uji Autokorelasi  
Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-1.48059E9
Cases < Test Value	37
Cases >= Test Value	38
Total Cases	75
Number of Runs	44
Z	1.281
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200

a. Median

Uji output autokorelasi diatas menunjukkan bahwa Nilai Runs Test adalah -1,48059E9 , dengan probablitas 0, 200 signifikansi pada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi autokorelasi.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan mengerahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Bila *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat lain berbeda, maka disebut Heterokedastiitas dan sebaliknya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Pada penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Park, yang dilakukan dengan cara meregresikan Ln residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel-variabel independen. Adapun hasil output SPSS sebagai berikut:

**Tabel.3 Uji Heterokedastisitas  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	48.900	.774		63.178	.000
PAD	-1.547E-14	.000	-.004	-.022	.983
DAU	-5.553E-13	.000	-.101	-.419	.676
DAK	1.553E-12	.000	.108	.490	.626
DBH	5.009E-12	.000	.355	1.694	.095

a. Dependent Variable: ln\_res2

Berdasarkan output hasil uji hetrokedastiistas terbukti bahwa koefisien beta secara statistik tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian bebas dari masalah heterokedastisitas sesuai dengan pendapat (Ghozali, 2013).

#### Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2001:74), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas bertujuan utuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Berdasarkan hasil olah data SPSS dengan menggunakan Uji One Sample Komogorov-Smirnov Test adalah:

**Tabel 4. Uji Nomalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000281
	Std. Deviation	1.43651249E11
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		1.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.161

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah spefisikasi model yang digunakan sudah benar atau belum. Hasil olah data Uji Linearitas adalah:

**Tabel. 5 Uji Linear  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.052 <sup>a</sup>	.003	-.054	1.47494951E11

a. Predictors: (Constant), DBH2, DAK2, PAD2, DAU2



Uji Linearitas pada penelitian ini, menggunakan Uji Langrange Multiplier. Uji LM dilakukan dengan cara meregresi residual dengan kuadrat variabel independen. Hasil output SPSS menunjukkan nilai  $R^2$  senilai -0,054 dengan jumlah observasi 75, maka diperoleh nilai  $c^2$  hitung sebesar  $= 75 \times -0,054 = -4,05$ . Nilai ini dibandingkan dengan nilai  $c^2$  tabel dengan  $df = 75$  dan tingkat signifikansi 5% maka diperoleh  $c^2$  tabel sebesar 96,21; sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang benar adalah model linear karena nilai  $c^2$  hitung  $<$  nilai  $c^2$  tabel.

### Persamaan Regresi Linear

Belanja Modal :  $1.003E11 + 0,271 \text{ PAD} + 0,151 \text{ DAU} + 0,142 \text{ DAK} + 0,208 \text{ DBH} + e$

### Pengujian Hipotesis

Terdapat Empat Hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pertama kedua, ketiga dan keempat menggunakan uji t (Uji Parsial); untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji hipotesis kelima menggunakan uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

### Uji t-statistik (Parsial)

Tabel 6. Uji t-Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.003E11	4.715E10		2.127	.037
PAD	.271	.044	.612	6.204	.000
DAU	.151	.081	.223	1.869	.066
DAK	.142	.193	.080	.734	.465
Dana Bagi Hasil	.208	.180	.119	1.152	.253

a. Dependent Variable: Belanja Modal

### Hipotesis Pertama

Hasil output SPSS berdasarkan tabel 4.6, Uji Hipotesis pertama melalui Uji t

(parsial) diperoleh probabilitas t-statistik senilai  $0,000 < = 0,05$  artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada taraf nyata  $= 5$  persen.

### Hipotesis Kedua

Hasil output SPSS berdasarkan tabel 6, Uji Hipotesis kedua melalui Uji t (parsial) diperoleh probabilitas t-statistik senilai  $0,066 > = 0,05$  artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada taraf nyata  $= 5$  persen.

### Hipotesis Ketiga

Hasil output SPSS berdasarkan tabel 4.6, Uji Hipotesis ketiga melalui Uji t (parsial) diperoleh probabilitas t-statistik senilai  $0,465 > = 0,05$  artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada taraf nyata  $= 5$  persen.

### Hipotesis Keempat

Hasil output SPSS berdasarkan tabel 4.6, Uji Hipotesis keempat melalui Uji t (parsial) diperoleh probabilitas t-statistik senilai  $0,253 > = 0,05$  artinya Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada taraf nyata  $= 5$  persen.

### Uji F-statistik (Simultan)

#### Hipotesis Kelima

Olah data dengan SPSS untuk Uji F-statistik diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 7. Uji F-Statistik (Simultan)

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.564E24	4	1.391E24	63.767	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.527E24	70	2.181E22		
Total	7.091E24	74			

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, DAK, PAD, DAU

ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.564E24	4	1.391E24	63.767	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.527E24	70	2.181E22		
Total	7.091E24	74			

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, nilai F-statistik sebesar 0,000 < =0,05 berarti dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

### Uji Koefisien Determinasi (Adj R<sup>2</sup>)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 <sup>a</sup>	.785	.772	1.477E11

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, DAK, PAD, DAU

Hasil olah data menunjukkan (Ajd R<sup>2</sup>) sebesar 0,772. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi mampu menjelaskan variabilitas *Capital Expenditure* atau Belanja Modal sebesar 77,20 persen sisa 22,8 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal. Serta hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja

Modal. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal atau *Capital Expenditure*.

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Capital Expenditure/ Belanja Modal*

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kuntari, Chariri, & Prabowo, 2019), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan hasil penemuan (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota di Jawa Barat maka akan semakin tinggi pula Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

(Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, 2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dipunyai Pemerintah Daerah juga akan meningkat, serta akan meningkatkan kemandirian Daerah tersebut. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang tinggi maka Pemerintah Daerah akan meningkatkan belanja modalnya. Belanja Modal atau *Capital Expenditure*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat akan lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *Capital Expenditure*/ Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Sartika, N., Kirmizi dan Indrawati, 2017) dan penelitian yang dilakukan (Pangestu, 2019) membuktikan secara empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, 2017). Hal ini dikarenakan dana transfer berupa DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak semuanya digunakan untuk belanja modal. DAU banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya. Hal ini juga di

sebabkan oleh beberapa faktor anggaran belanja modal yang digunakan tidak juga hanya berasal dari dana transfer (DAU) tetapi dapat diambil dari anggaran lainnya seperti pendapatan asli daerah (Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, 2017).

## 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap *Capital Expenditure*/ Belanja Modal

Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ndede, Yunistin; Sondakh, Jullie J dan Pontoh, 2016) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini sesuai penelitian (Sartika, N., Kirmizi dan Indrawati, 2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014), membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. desentralisasi terbukti secara empiris tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) disebut juga sebagai "*specific purpose grant*" merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah yang terpilih guna membantu mendanai kegiatan bersifat khusus, serta merupakan kewenangan daerah tersebut tetapi sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan

atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat. Dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Sartika, N., Kirmizi dan Indrawati, 2017).

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini memberikan arti bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat tidak berpengaruh terhadap meningkatnya belanja Modal.

#### **4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap *Capital Expenditure*/ Belanja Modal**

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian (Sartika, N., Kirmizi dan Indrawati, 2017), menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti secara empiris memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Expenditure*/ Belanja Modal. Hasil ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014), menunjukkan bahwa Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar tidak selalu mempengaruhi besarnya belanja modal. (Rifai, 2017), perilaku belanja modal tidak dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil

(DBH). Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pemerintah pusat ke daerah. Menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyat melalui pengelolaan kekayaan daerah secara proporsional dan professional. Dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan, yang merupakan salah satu alokasi anggaran ke sektor belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Hal ini mensiratkan Pemerintah daerah kurang dapat menggunakan dana perimbangan keuangan secara maksimal. Jadi dapat disimpulkan bila Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

**Kesimpulan dari penelitian tentang “Analisis *Capital Expenditure* atau Belanja Modal” adalah:**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Artinya semakin besar Pendapatan Asli di Kabupaten/ Kota di Jawa Barat maka akan semakin tinggi pula *Capital Expenditure* atau pengeluaran modalnya. (Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, 2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber

pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Daerah juga akan meningkat, serta akan meningkatkan kemandirian Daerah tersebut. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka Pemerintah Daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Serta Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat akan berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja. Hal ini dikarenakan dana transfer berupa DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak semuanya digunakan untuk belanja modal. DAU banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor anggaran belanja modal yang digunakan tidak juga hanya berasal dari dana transfer (DAU) tetapi dapat diambil dari anggaran lainnya seperti pendapatan asli daerah (Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, 2017).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini sesuai penelitian (Sartika, N., Kirmizi dan Indrawati, 2017) dan

penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014), membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. desentralisasi terbukti secara empiris tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini memberikan arti bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat tidak berpengaruh terhadap meningkatnya belanja Modal.

4. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Capital Expenditure/* Belanja Modal. Hasil ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, 2014) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang besar tidak selalu mempengaruhi besarnya belanja modal. (Rifai, 2017), perilaku belanja modal tidak dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Hal ini mensiratkan Pemerintah daerah kurang dapat menggunakan dana perimbangan keuangan secara maksimal. Jadi dapat disimpulkan bila Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat tidak

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

#### Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah tinggi akan semakin tinggi Belanja Modalnya, tetapi untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) belum digunakan secara optimal untuk Belanja Modal. Sarannya Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat perlu mengoptimal Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Belanja Modal atau *Capital Expenditure*.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia agar hasilnya dapat digunakan secara lebih luas dan lebih obyektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifah,S., Iswanaji, C., dan Priyono, N. (2014). *Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Pertode Tahun 2007-2010)*. 40, 46–6.
- Ghozali. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. *Jurnal Administrasi Bisnis*. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2014.03.018>
- Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics 4th Edition. In *Tata McGraw-Hill*. <https://doi.org/10.1126/science.1186874>
- Hairiyah; Malisan, Lewi; Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *KINERJA*, 14(2), 85–91.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ifa, K. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timue. *Global*.
- Kuntari, Y., Chariri, A. dan, & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital Expenditure of Local Government. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1–13.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. In *dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan dituntut untuk memiliki kenandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantu*.
- Ndede, Yunistin; Sondakh, Jullie J dan Pontoh, W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 586–595. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13522/13107>
- Pangestu, P. P. M. R. E. P. J. . ; E. S. K. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Provinsi Jambi 2009-2017). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA*, 4(4), 26–32. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/8445>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rifai, R. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 5(7), 169–180.
- Sartika, N., Kirmizi dan Indrawati, N. (2017). Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Sorot*, 12(2), 121. <https://doi.org/10.31258/sorot.12.2.4902>
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D. *Bandung: Alfabeta*.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Penerbit Andi : Yogyakarta.